

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya Perdana dan Benget Manahan Silitonga,dkk, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* , Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat

Fitriyah, 2012, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Deepublish, Sleman

Janendri M.Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press

Jihan Amalia Syahidah,2021, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Duta Media Publishing, Pemekasan

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid III*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan

Khairul Fahmi, 2021, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Rajawali Pers

Malik Haramain dan MF. Nurhuda Y, 2000, *Mengawal Transisi:Refleksi Atas Pemilu '99*, UNDP, Jakarta

Manginut Siregar, 2023, *Antikorupsi*, UWKS Press, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press

Muhammad Afifuddin, 2020, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Gramedia, Jakarta

Muhammad Erwin, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Mohammad Saihu, Arif Ma'ruf Suha ,dkk, 2015, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, DKPP RI,

Moh. Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Cet.8

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Hukum*: Qiara Media, Vol.1

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius. Makassar

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Samsudin, Dian Askhabul Yamin, dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor,

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press

Shiddiq, Muhammad Syaeful dkk. 2022. *Demokrasi Politik Indonesia*: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metologi Penelitian*, KBM Indonesia, Vol.I,

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2018, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

C. Jurnal

Alasman Mpesau, 2021, Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia, Jurnal Audito Compara Law Journal, Vol.2, No.2

Alvin Fauzi, Haryadi, Pro dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 6, No.2

Caskiman, Nurfadillah, dan Yohanes Putra Randa Labi, Analisis Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Terhadap Permasalahan Mantan Narapidana Yang Ingin Mencalon Dirinya Sebagai Anggota Legislatif, Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Justice Dialectial

Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, 2018, Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial, Jurnal Majalah Hukum Nasional, No,2

Irma Anisti Lusiana dan Sri Redjeki Slamet, 2022, Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif, Jurnal JCA of LAW, Vol.3

La Ode Risman, 2020, Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jurnal STIH Painan, Vol.7, No.2

Muhammad Ja'far, 2018, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Ilmiah Madani Legal Review, Vol.2, No.1,

M. Darin Arif Mu'allifin, 2015, Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indoensia, Jurnal, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.2

M Yahya Wahyudin , 2023, Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu, Jurnal Trias Politica, Vol.1, No.1

Muwahid, 2020, Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, Vol. 10, No.1 ,hlm:86

Nurlindah, Abd. Rahman, dan Sahban, 2024, Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif, Jurnal of Lex Philosophy, Vol. 5, No:2

Samo Wuragil, 2020, Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Syariat, Vol. VI, No.2

Sofyan Kriswantoni, 2018, Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi, Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 2, No. 2

Sun Fatayati, 2017, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, Jurnal, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 28, No.1

Sulis Setiowati, Achmad Umardani, 2024, Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan, Jurnal Manabia; Journal of Consitutional Law, Vol. 4, No.1

Yessinia Bela Abidin, La Senu, dan Guasman Tatawu, 2020, Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu, Jurnal Legal Research, Vol.2, No.2

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

[https://www.ditjenpas.go.id/eks-narapidana-antara-diterima-atau-ditolak masyarakat](https://www.ditjenpas.go.id/eks-narapidana-antara-diterima-atau-ditolak-masyarakat)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman

<https://pariamankota.go.id/site/home>

[https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota- legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi](https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi)

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemetaan%20Mantan%20Napi%20Korupsi%20dalam%20DCT%20Caleg%20Pemilu%202024.pdf>